

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pemberdayaan ekonomi perempuan umumnya dianggap sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan di tingkat perdesaan. Namun dalam realitasnya, transformasi bantuan modal menjadi kemandirian usaha yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan besar. Di Desa Wadang, visi ideal program tersebut berbenturan dengan tingginya angka risiko kegagalan usaha pada tahap awal penerimaan bantuan, di mana bantuan sarana produksi fisik sering kali tidak secara langsung menghasilkan pendapatan yang stabil bagi keluarga miskin tanpa adanya kesiapan kapasitas pelaku usahanya. Kondisi ini diperkuat bahwa kegagalan usaha mikro di perdesaan sering kali disebabkan oleh rendahnya resiliensi ekonomi dan manajemen risiko pada tahap rintisan, yang membuat intervensi bantuan modal menjadi rentan terhadap kendala operasional dalam jangka waktu singkat. (Moh Muqit & Nurul Hikmah, 2025).

Secara lebih spesifik, kerentanan usaha di Desa Wadang terlihat dari perilaku ekonomi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Jatim Puspa yang cenderung mengalami kegagalan dini hanya dalam waktu satu hingga dua minggu setelah menerima bantuan barang modal. Berbagai jenis usaha mulai dari toko kelontong, warung makan, hingga usaha jajanan sosis dan gorengan sering kali berhenti beroperasi akibat ketidakmampuan KPM dalam memisahkan aset produktif dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga yang mendesak. Menurut (Indriani D et al., 2023) Kondisi ini sejalan dengan analisis evaluasi

kebijakan yang menunjukkan bahwa tanpa pendampingan teknis yang intensif, bantuan modal barang hanya akan menjadi solusi sesaat yang kehilangan nilai manfaatnya sebelum mencapai target kemandirian yang diinginkan oleh pemerintah.

Ketimpangan antara barang bantuan yang diterima dengan kemampuan KPM dalam membaca peluang pasar di desa menjadi akar masalah utama yang memicu banyaknya warga berhenti usaha (Saputra Aldi et al., 2022). Di Desa Wadang, tantangan pengelolaan seperti kebingungan mencatat keuangan harian dan sulitnya mencari pembeli baru membuat para perempuan ini kalah bersaing, sehingga niat awal untuk mandiri justru terjebak kembali pada ketergantungan bantuan. Tingginya angka kegagalan usaha di kalangan keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi alasan kuat untuk melakukan analisis mendalam guna mengidentifikasi penyebab utama mengapa bantuan modal belum mampu membangun ketahanan ekonomi perempuan di Desa Wadang, Kecamatan Ngasem, secara berkelanjutan.

Implementasi pemberdayaan sosial ekonomi di tingkat desa tersebut secara formal didasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Jatim Puspa Atau Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan. Program. Program tersebut dirancang sebagai mekanisme intervensi strategis berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang secara spesifik ditujukan untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi pasca-graduasi bagi anggota rumah tangga perempuan yang sebelumnya terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Jatim Puspa bertujuan memberikan dukungan ekonomi yang memadai, sehingga perempuan yang telah mengembangkan usaha rintisan atau memiliki potensi kemandirian tidak kembali terjatuh dalam garis kemiskinan atau kemiskinan berulang akibat hilangnya hilangnya jaring pengaman sosial dari bantuan tunai rutin yang sebelumnya diterima (Nuryana, 2022).

Secara operasional, program Jatim Puspa menerapkan konsep pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk barang (bukan uang tunai) senilai Rp2.500.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha produktif yang berkelanjutan (Pakistaji et al. (2019). Pemberian bantuan dalam bentuk barang didasarkan pada pertimbangan bahwa aset produktif lebih mampu mendorong keberlanjutan usaha dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Dengan demikian, perempuan penerima manfaat diharapkan memiliki sarana usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat kondisi sosial ekonomi keluarganya (Rovidah et al., 2026).

Pelaksanaan Program Jatim Puspa tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk barang produktif, tetapi juga menekankan pentingnya proses pemberdayaan melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada setiap penerima manfaat. Pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha, menyusun perencanaan usaha, mengembangkan pemasaran, serta menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan usaha mikro. Menurut Indriani D et al. (2023), keberhasilan Program Jatim Puspa tidak hanya

ditentukan oleh tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan program dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bantuan modal dan pendampingan merupakan dua komponen yang saling melengkapi sehingga keduanya perlu dilaksanakan secara optimal agar tujuan program dapat tercapai.

Pada dasarnya, Program Jatim Puspa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi perempuan melalui penguatan kapasitas dalam mengelola usaha. Melalui program ini, perempuan diharapkan mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi ekonomi di wilayahnya sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Dengan meningkatnya kemampuan dalam mengelola usaha, perempuan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Program Jatim Puspa menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan modal usaha, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat dalam mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan usaha mikro dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pendampingan yang memadai, kemampuan manajerial, serta kemampuan penerima manfaat dalam beradaptasi terhadap berbagai tantangan usaha pada tahap awal pengembangan (Sumani et al., 2022).

Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan Program Jatim Puspa perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi tidak hanya menilai penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, tetapi juga menilai bagaimana proses pelaksanaan program mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan di Desa Wadang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Desa Wadang dipilih karena berdasarkan data Pemerintah Desa Wadang Tahun 2025 masih ditemukan penerima manfaat yang belum mampu mempertahankan usahanya setelah menerima bantuan Program Jatim Puspa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh di lapangan sehingga diperlukan evaluasi secara lebih mendalam terhadap pelaksanaan Program Jatim Puspa.

Tabel 1

Jumlah Penerima dan Keberlanjutan Usaha Program Jatim Puspa di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah	Presentase
1.	KPM Program Jatim Puspa	39	100%
2.	KPM yang usaha berlanjut	24	38,5%
3.	KPM usaha gagal	15	61,5%

Sumber : Pemerintah Desa Wadang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas, jumlah penerima Program Jatim Puspa di Desa Wadang pada Tahun 2025 sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, hanya 15 KPM atau sebesar 38,5% yang masih

mampu mempertahankan usahanya hingga saat penelitian dilakukan. Sementara itu, sebanyak 24 KPM atau 61,5% telah gagal melanjutkan usahanya setelah menerima bantuan program dalam waktu 2-4 minggu. Tingginya persentase kegagalan usaha menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat belum mampu mempertahankan keberlanjutan usaha yang telah dirintis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tujuan Program Jatim Puspa dalam mendorong pemberdayaan sosial ekonomi perempuan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha penerima manfaat.

Tabel 2

**Jenis Usaha Penerima Program Jatim Puspa di Desa Wadang
Kecamatan Ngasem Tahun 2025**

No.	Jenis Usaha	Jumlah KPM
1.	Perdagangan (sembako,jajanan,warung kopi,catering)	33 orang
2.	Peternakan	4 orang
3.	Menjahit	2 orang

Sumber : Pemerintah Desa Wadang Tahun 2025

Dari data diatas, mayoritas penerima Program Jatim Puspa di Desa Wadang menjalankan usaha pada sektor perdagangan, yaitu sebanyak 33 KPM dari total penerima manfaat. Jenis usaha tersebut meliputi toko sembako, toko sayur, warung, usaha jajanan, dan catering. Selain itu, terdapat 4 KPM yang

mengembangkan usaha di bidang peternakan serta 2 KPM yang menjalankan usaha menjahit.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan program diarahkan untuk mendukung usaha mikro di sektor perdagangan yang relatif mudah dijalankan oleh masyarakat. Meskipun jenis usaha yang dikembangkan cukup beragam, tingginya jumlah usaha yang tidak mampu bertahan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, mengindikasikan bahwa keberhasilan Program Jatim Puspa tidak hanya dipengaruhi oleh jenis usaha yang dijalankan, tetapi juga oleh faktor lain, seperti pendampingan, pembinaan, kemampuan manajerial, dan kesiapan penerima manfaat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan Program Jatim Puspa untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha penerima manfaat...

Tingginya jumlah penerima manfaat yang mengalami kegagalan usaha menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Jatim Puspa tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian bantuan modal, tetapi juga oleh kesiapan penerima manfaat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Kusuma et al. (2021), menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya memberikan akses terhadap bantuan produktif, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas, kemampuan mengelola usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan Program Jatim Puspa tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari

kemampuan penerima manfaat dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Wadang masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pendampingan dan penguatan kapasitas usaha penerima manfaat (Hasanah & Alfiana, 2022). Berdasarkan hasil temuan lapangan, sebagian KPM belum mampu memisahkan aset usaha dengan kebutuhan rumah tangga sehingga barang modal belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha. Selain itu, pendampingan yang diberikan masih terbatas sehingga sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengelola usaha ketika menghadapi kendala pada tahap awal pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas penerima manfaat (Wulandari & Rini, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Wadang tidak hanya terletak pada pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga pada efektivitas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas penerima manfaat. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi perempuan tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya secara berkelanjutan. Jika berbagai kendala tersebut tidak segera diidentifikasi dan diperbaiki, maka tujuan Program Jatim Puspa dalam mewujudkan kemandirian

sosial ekonomi perempuan akan sulit tercapai (Idayu & Husni, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha penerima manfaat di Desa Wadang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Jatim Puspa. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga pada pelaksanaan program secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pendampingan, pembinaan, monitoring, hingga hasil yang dicapai oleh penerima manfaat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Mayreista et al., 2025).

Selanjutnya, penelitian ini juga memfokuskan evaluasi pada pelaksanaan Program Jatim Puspa dalam pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di Desa Wadang. Pemberdayaan sosial ekonomi perempuan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemampuan perempuan dalam mengelola usaha, mengambil keputusan ekonomi keluarga, membangun kepercayaan diri, serta meningkatkan partisipasi sosialnya dalam kehidupan masyarakat (Arifin et al., 2021). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program,

bagaimana proses pendampingan, pembinaan, dan monitoring dilaksanakan, serta bagaimana hasil program terhadap keberlanjutan usaha penerima manfaat.

Dalam penelitian ini, evaluasi program dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam . Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) merupakan model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan dan dirancang untuk membantu pengambil kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, serta mengembangkan suatu program secara berkelanjutan (Stufflebeam & Zhang, 2017). Model ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan proses pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah akademik yang belum dieksplorasi oleh kajian evaluasi sebelumnya terkait pemberdayaan perempuan, khususnya melalui analisis mendalam terhadap program Jatim Puspa. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, penelitian yang dilakukan oleh Moh Muqit & Nurul Hikmah (2025), menekankan pembangunan kemandirian ekonomi secara umum melalui mekanisme administrasi dan distribusi bantuan di Kabupaten Jember. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program secara umum, namun belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha penerima manfaat setelah memperoleh bantuan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Wadang dengan menganalisis tingginya jumlah penerima manfaat yang belum mampu

mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melengkapi kajian mengenai evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa, khususnya pada aspek pelaksanaan program dan keberlanjutan usaha penerima manfaat.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar KPM mengalami kegagalan usaha, penelitian ini menggunakan model evaluasi program CIPP sebagai instrumen analisis utama. Melalui evaluasi context, input, process, dan product, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa, terutama pada aspek kesiapan penerima manfaat, pelaksanaan pendampingan, monitoring usaha, serta keberlanjutan hasil program (Venezia & Soesiantoro, 2021). Pendekatan evaluatif ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program di tingkat lapangan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha perempuan penerima bantuan di Desa Wadang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa dalam pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di Desa Wadang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai oleh penerima manfaat melalui pendekatan model evaluasi CIPP. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan Program Jatim Puspa,

khususnya pada aspek pendampingan, pembinaan, monitoring, dan penguatan kapasitas usaha agar tujuan pemberdayaan sosial ekonomi perempuan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2019) Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan data dan pengkajian. Perumusan masalah merupakan salah satu point yang penting dalam penelitian, dimana dalam perumusan masalah dapat berisi pertanyaan terkait penelitian yang nantinya akan dijawab melalui hasil data penelitian yang harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud dari penulis dan pembaca sama, tidak beda paham. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Evaluasi Program Jatim Puspa Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi perempuan di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saat ini?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2018). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Bagaimana evaluasi program Jatim

Puspa dalam pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di Desa Wadang
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian evaluasi kebijakan dan pemberdayaan sosial ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan model evaluasi CIPP Daniel L. Stufflebeam pada Program Jatim Puspa.

b. Manfaat Praktis:

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, serta monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi perempuan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya perempuan penerima manfaat Program Jatim Puspa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan usaha, peningkatan kapasitas diri, serta pemanfaatan bantuan secara produktif untuk mendukung kemandirian sosial ekonomi.

3) Bagi Peneliti

Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam pengembangan kajian mengenai evaluasi program pemerintah, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di wilayah perdesaan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi pelaksanaan penelitian. Di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menyoroti tingginya angka kegagalan dini pada KPM Jatim Puspa di Desa Wadang. Selain itu, bab ini mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik maupun secara praktis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Wadang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teoritis yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan model evaluasi program CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam sebagai alat analisis utama dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa. Selain itu, bab ini juga memuat telaah

penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dan evaluasi program pemerintah guna mempertegas kebaruan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid. Pembahasan meliputi pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dijelaskan pula mengenai fokus penelitian, populasi dan sampel penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan berdasarkan model Miles & Huberman.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan deskripsi umum lokasi penelitian serta penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara mendalam berdasarkan komponen evaluasi CIPP yang meliputi context, input, process, dan product. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Wadang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan usaha pada 24 dari 39 KPM penerima bantuan serta faktor-faktor penghambat seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya intensitas monitoring, serta hambatan manajerial dalam transformasi bantuan modal menjadi pendapatan stabil.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan padat. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran atau rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan agar pola pendampingan Program Jatim Puspa di masa mendatang dapat lebih adaptif dan berkelanjutan bagi perempuan di perdesaan yang mendapatkan bantuan.